

**PERAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DECISION SUPPORT
SYSTEM TERHADAP PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI PEMERINTAHAN DESA
NGLONGSOR KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK**

Suci Nurhidayah^{1*}, Andrianto², Zainiyah Alfirdaus³

^{1,2}Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

³Universitas Bina Nusantara, Jakarta, Indonesia

suci.nurhidayah-2021@pasca.unair.ac.id^{1*}

Manuskrip: Februari -2023; Ditinjau: Februari -2022; Diterima: Maret -2023; Online: April -2023;
Diterbitkan: April-2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran pemberdayaan perempuan melalui decision support system terhadap pengambilan kebijakan di pemerintahan desa nglongsor kecamatan tugu kabupaten trenggalek. Metode menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian didapat keterangan bahwa dengan adanya perencanaan yang matang dan anggaran yang ada maka diharapkan kegiatan perempuan perempuan di desa Nglongsor bisa berkelanjutan dan dapat menopang ekonomi mereka sehingga kebaikan kehidupan akan segera terwujud.

Kata Kunci: Pendampingan, Pemberdayaan, Ekonomi, Perempuan, Kebijakan

ABSTRACT

The research objective was to analyze the role of women's empowerment through a decision support system for policy making in the Nglongsor village government, Tugu sub-district, Trenggalek district. The method uses descriptive qualitative analysis. The results of the study obtained information that with careful planning and the existing budget, it is hoped that the activities of women in Nglongsor village can be sustainable and can support their economy so that the goodness of life will soon be realized.

Keywords: Coach, Empowerment, Economy, Women, Policy

I. PENDAHULUAN

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). Perempuan dapat dikatakan berdaya apabila bisa menjadikan dirinya sebagai makhluk yang mempunyai manfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya, serta dengan bebas mengapresiasi dirinya untuk berkontribusi dalam setiap kesempatan. Pada era sekarang ini perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dengan adanya kesetaraan gender. Kebijakan pemberdayaan perempuan di Indonesia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan strategis dan praktis perempuan. Pemenuhan kebutuhan strategis berkaitan dengan perubahan subordinasi perempuan terhadap laki-laki, seperti perubahan pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan, kontrol terhadap sumber daya dan lain-lain.

Pada penelitian ini kami akan mengangkat peran perempuan di Desa Nglongsor Kecamatan Tugu yang melakukan kegiatan-kegiatan produktifnya melalui peran berdaya perempuan melalui PKK, organisasi PKK sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatannya adalah melalui Kelompok Dasa Wisma, yang merupakan kelompok PKK terkecil yang terdiri dari 10-20 rumah yang terkoordinir baik administrasi dan kegiatannya. Dengan terbentuknya dasawisma ini diharapkan dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis, serta dapat mengubah keadaan kepada yang lebih maju lagi. Seperti dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan mutu dalam masyarakat. Dasawisma harus lebih mampu untuk berperan di masyarakat, baik sebagai motivator, komunikator, dinamisator yang mampu menyerap segala informasi dari masyarakat untuk kembali dipenuhi sebagai wujud kebijakan yang diambil pemangku kepentingan.

Seperti kita ketahui saat ini, kemajuan desa biasanya hanya dilihat dengan banyaknya infrastruktur dan seabrek pembangunan fisik lainnya yang dibangun menggunakan dana desa. Pada awalnya tujuan dari dana desa memang untuk mewujudkan kemandirian desa dan menciptakan kemandirian desa-desa secara berkelanjutan, dengan cara pemberdayaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal dan juga penciptaan akses transportasi. Namun bagaimana tujuan dari dana desa dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas, terutama jika dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan.

Program pemberdayaan perempuan desa ini, sebetulnya tak kalah penting dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang saat ini benar-benar digenjut di desa-desa di seluruh Indonesia. Harus diakui bahwa pemberdayaan perempuan desa melalui dana desa memang saat ini jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur.

Padahal kita semua mengetahui bahwa sebenarnya pada diri perempuan desa lah persoalan-persoalan akar rumput yang berkaitan dengan ekonomi dalam hal ini peningkatan pendapatan keluarga, kesehatan misalnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan balita, kasus stunting, kesakitan, kejadian gizi buruk, masalah sosial bermula. Dan untuk mengatasi hal-hal tersebut tidak bisa hanya dengan mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik di desa namun juga harus dibarengi dengan pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur sosial yang salah satunya dengan pemberdayaan perempuan.

Oleh karena itulah pemberdayaan perempuan di desa Nglongsor Kecamatan Tugu ini, mulai digerakkan dengan menyediakan akses yaitu Organisasi PKK. Dimana ujung tombak dari pelaksanaan program PKK adalah Kelompok Dasawisma. Dengan terbentuknya dasawisma ini diharapkan dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis, serta dapat mengubah keadaan kepada yang lebih maju lagi. Seperti dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan mutu dalam masyarakat.

Dasawisma harus lebih mampu untuk berperan di masyarakat, baik sebagai motivator, komunikator, dinamisator yang mampu menyerap segala informasi dari masyarakat untuk kembali dipenuhi sebagai wujud kebijakan yang diambil pemangku kepentingan. Selain itu, melalui dasawisma tersebut diharapkan dapat menyediakan data lengkap melalui kegiatan pendataan yang sesuai di lapangan sehingga dihasilkan suatu informasi penting sebagai Decision Support System (DSS). Dengan adanya DSS ini diharapkan mampu menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan di Pemerintah Desa Nglongsor.

Pemberdayaan Perempuan melalui peran Dasawisma yang dilakukan di Desa Nglongsor adalah suatu gerakan yang sangat fenomenal, dimana sebelumnya para perempuan di desa ini tidak mempunyai akses dalam menyalurkan aspirasinya dikarenakan tidak aktifnya organisasi PKK pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu dengan perubahan pimpinan, dibukalah akses tersebut. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk kelompok dasawisma di seluruh desa melalui RT dan terbentuk 57 kelompok, dengan anggota seluruh rumah yang ada di desa ini tanpa kecuali. Setelah terbentuk kelompok yang beranggotakan 10 – 20 rumah dengan diketuai oleh ketua dasawisma, maka dimulailah kegiatannya dengan melakukan pendataan. Form baku dasawisma dari hasil Rakernas IX TP PKK Pusat tahun 2021, dipakai sebagai instrument pendataan. Sungguh diluar dugaan dengan semangat luar biasa para perempuan penggerak itu melakukan kegiatan serentak dan cepat. Hasil pendataan didapat disertai dengan kegiatan dimasing masing kelompok sesuai dengan kebiasaan yang sudah ada di setiap wilayah. Dari kegiatan ini akhirnya didapat data desa dari segala aspek ekonomi, sosial, Kesehatan, Pendidikan, kependudukan dapat tersusun dan kegiatan di masing masing kelompok sudah terlaksana.

Pergerakan perempuan yang bisa dikatakan sebagai awal pemberdayaan perempuan di desa ini bagaikan burung yang dilepas dari sangkarnya. Kegiatan di setiap kelompok mulai difestifalkan dengan adanya lomba dasawisma. Yang menjadi bahan penilaian adalah administrasi dasawisma, kelengkapan hasil pendataan, kebersihan lingkungan kelompok, kegiatan kelompok dan kekompakan kelompok. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memotivasi para warga dalam berkegiatan. Dengan adanya pergerakan dasawisma yang luar biasa ini secara otomatis merupakan kegiatan PKK Desa karena dasawisma sebagai kelompok terkecil organisasi PKK dan sebagai ujung tombak pelaksanaan program dan kegiatan yang terwadahi dalam 10 Program Pokok PKK.

Berdasarkan latar belakang itulah peneliti mengangkat judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Peran Dasawisma Terhadap Decision Support System dalam Pengambilan Kebijakan di Pemerintah Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar, kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih besar dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki (Priyono dan Pranaka, 1996).

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan negara. Posisi perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya (Zakiyah, 2010). Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan. Hal ini didasarkan pada satu

pemikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya di ikut sertakan dalam pembangunan.

Berdasarkan Hasil Rakernas IX TP PKK Pusat Tahun 2021, Dasa wisma adalah sebuah kelompok ibu-ibu yang berasal dari 10 -20 rumah yang bertetangga, yang terkoodinir dan diketuai oleh ketua dasawisma dalam memudahkan jalannya sebuah program. Pengumpulan dana, kuesioner, tertib administrasi adalah beberapa contoh dari tanggung jawab ketua dawis yang kemudian hasilnya diteruskan pada Ketua PKK. Kegiatan ini diarahkan pada peningkatan pemberdayaan perempuan, dan bentuk kegiatannya seperti misalnya arisan (PKK), pembuatan jamban, sumur, kembangkan dana sehat (PMT, pengobatan ringan, membangun sarana sampah dan kotoran), peningkatan pendapatan keluarga dan kegiatan masyarakat lainnya.

Decision Support System merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. DSS adalah sistem informasi interaktif menganalisis volume besar data untuk menginformasikan keputusan bisnis. DSS mendukung tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan organisasi dalam membuat keputusan yang lebih baik dengan menilai ketidakpastian yang signifikan dan pengorbanan yang terlibat dalam membuat satu keputusan dengan keputusan lainnya.

DSS memanfaatkan kombinasi data mentah, dokumen, pengetahuan pribadi, dan/atau model bisnis untuk membantu pengguna membuat keputusan. Di dalam pengambilan keputusan dibutuhkan sebuah data pendukung yang dapat digunakan sebagai dasar, agar pengamilan keputusan nya tepat dan bijak. Dengan dukungan data, sebuah opini tidak hanya menjadi asumsi kosong yang—mungkin saja—tidak dapat menghadirkan sebuah keputusan tepat bagi organisasi.

Tak hanya untuk penentuan keputusan besar, pengolahan data juga peran vital untuk mengukur performa karyawan, seperti tingkat keberhasilan dalam mengerjakan proyek, tingkat kehadiran, waktu lembur yang diambil, dan masih sangat banyak hal yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pengolah data. Semakin berkembangnya zaman, pemanfaatan data tidak sekedar tentang bagaimana mengolahnya, tapi juga mengenai bagaimana data tersebut dapat ditampilkan secara real-time demi transparansi dalam perusahaan.

William Dun (1999) Menurutnya “Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat yang mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat.

Carter Victor Good dalam bukunya Dictionary of Education (1959) menyampaikan pengertian kebijakan, yaitu sebuah pertimbangan yang didasari oleh penilaian faktor-faktor yang bersifat situasional, sifatnya umum dalam menyusun perencanaan, dan memberikan arahan ketika pengambilan keputusan agar nantinya tujuan dapat tercapai. Kebijakan adalah suatu konsep dan strategi yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan dengan tujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan menciptakan kesejahteraan Tujuan dan fungsi kebijakan antara lain adalah untuk menjamin kepentingan masyarakat umum sebisa mungkin. Meski pada implementasinya banyak kebijakan yang belum sesuai, namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan dan diganti jika sudah tidak relevan

III. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif pendekatan Deskriptif yang dilakukan dengan Wawancara mendalam dengan suatu komunitas atau ruang lingkup sosial yang lebih luas agar dapat mendorong terjadinya perubahan kondisi hidup yang

lebih baik. metode Penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman dari kenyataan melalui metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, Menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci terkait informasi data dan Fakta yang terjadi di lapangan, ada pula studi yang digunakan untuk peneliti dan hasil penulisan nya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai keadaan sebenarnya. Peneliti bermaksud untuk mencoba menggali bagaimana sebenarnya peran terbentuknya dasawisma ini bagi pemberdayaan perempuan rumah tangga dalam peningkatan life skill dan meningkatkan partisipasinya dalam kegiatan kemasyarakatan serta bagaimana dasiwsima ini sekaligus berperan dalam mempermudah koordinasi dan jaringan dalam rangka pengambilan suatu kebijakan masyarakat agar lebih tepat sasaran. Obyek penelitian adalah Ketua dan Sekretaris Kelompok Dasawisma yang ada di Desa Nglongsor. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelompok Dasawisma yang ada di Desa Nglongsor sebanyak 59 Kelompok Dasawisma. Sampling Penelitian sebanyak 118 responden, yaitu Ketua dan Sekretaris Dasawisma. Teknik analisis data adalah diawali dengan tahapan: mengumpulkan data primer dan sekunder, uji kelayakan data, uji validitas dan uji reabilitas, pengujian hipotesis dan interpretasi hasil pengolahan data mnggunakan excel atau program SPSS.

IV. HASIL PENELITIAN

Dari uraian diatas ternyata setelah dilakukan pendampingan kepada ibu ibu dalam memberikan akses sehingga bisa menuangkan segala aspirasi dan kebiasaan mereka untuk berpartisipasi di desanya. Pemberdayaan Perempuan melalui Kelompok Dasawisma adalah agar para perempuan lebih berperan yang melakukan kegiatan-kegiatan produktifnya melalui PKK. Organisasi PKK sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatannya adalah melalui Kelompok Dasa Wisma, yang merupakan kelompok PKK terkecil yang terdiri dari 10-20 rumah yang terkoordinir baik administrasi dan kegiatannya.

Kemudian dari hasil pendataan yang dilakukan , dimulai dengan pengoalahan data dengan merekap sesuai dengan format baku sesuai hasil Rakernas IX TP PKK Pusat Tahun 2021. Hasil pendataan dimasukkan dikomputer oleh tim yang dikoordinir oleh sekretaris PKK. Dari sinilah tersusun data yang menjadi dasar sebagai Data Suporting system atau pada penelitian ini sebagai Decision Support System. Hasil pendataan bisa dipastikan sangat akurat karena data adalah sesuai realita yang ada di lapangan dan pendataan meliputi seluruh warga tanpa ada yang ketinggalan.

Berikut ini rekap pendataan yang dihasilkan :

Tabel 1. Rekapitulasi Desa

**REKAPITULASI DESA
DATA WARGA DAN KEGIATAN WARGA KELOMPOK DASAWISMA**

DESA : NGLONGSOR
TAHUN : 2021

NO	DUSUN	JML KK	Jumlah Anggota Keluarga										Kriteria Rumah						Sumber Air Keluarga			Makanan Pokok		Warga Mengikuti Kegiatan				KET	
			Total		Balita		PUS	WUS	IBU HAMI L	IBU HEW USJI	LANSI A	TR I BU TA	Berkec Khusu	Sehat Layak Huni	Tidak Sehat Layak Huni	Memiliki Tmpt Pembua ngan Sampah	Memiliki SPAL	Memiliki Jamban Keluarga	Menem pel Stiker PHK	P D A M	S U M U R	Lain nya	B e r a s	Non Beras	UP2K	Peman faatan Tanah Resara ngan	Indus tri Ruma h Tangga a		Kerja Bakti
			L	P	L	P																							
1	CORAHMULYO	495	681	728	40	36	301	364	10	17	206	0	4	451	2	453	457	458	8	57	401	0	697	0	86	250	81	367	0
2	KRAJAN	575	795	814	43	41	290	323	4	22	254	1	12	496	2	497	473	500	62	31	456	1	498	0	157	406	61	451	0
3	ETANKALI	440	640	611	35	42	276	307	6	23	160	8	8	339	2	284	210	352	0	26	342	0	355	0	90	261	35	289	0
JUMLAH		1510	2116	2153	118	119	867	994	20	62	620	9	24	1286	6	1234	1140	1310	70	114	1199	1	1550	0	333	917	177	1107	0

Dari hasil pendataan ini TP PKK Desa yang sudah dibentuk akhirnya diserahkan ke Pemerintah Desa melalui Musyawarah Khusus Desa, sebagai sarana rutin rembug desa. Dari hasil Musdessus pihak Pemerintah Desa menyambut baik dan akan dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sinergi cantik telah dilakukan antara Tim Penggerak PKK

desa dengan Pemerintah Desa dalam membangun desa. Dengan adanya kegiatan tersebut akhirnya pihak desa memberikan keleluasaan kepada TP PKK untuk mengajukan Rencana Kerja berikutnya dan dilakukan di Musdes berikutnya untuk pengajuan anggaran, sehingga bisa dituangkan di Perencanaan Anggaran berikutnya. Dengan adanya perencanaan yang matang dan anggaran yang ada maka diharapkan kegiatan perempuan di desa Nglongsor bisa berkelanjutan dan dapat menopang ekonomi mereka sehingga kebaikan kehidupan akan segera terwujud.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa perempuan mempunyai kemampuan dan kesempatan yang sama apabila ada akses dan sarana yang disediakan. Dari akses dan kesempatan yang ada menjadikan perempuan berdaya dan bisa menyalurkan aspirasinya sehingga bisa menghasilkan produk yang luar biasa. Produk kegiatan pemberdayaan perempuan itu tidak hanya yang berupa benda atau material tetapi juga bentuk pekerjaan hebat yaitu hasil pendataan. Dan dari produk tersebut dapat digunakan sebagai dasar atau acuan dalam merencanakan, memutuskan hal hal penting yang ada dipemerintahan desa. Pemerintah Desa bisa menjadikan pendataan yang bisa disebut sebagai Decision Support System sebagai bahan pertimbangan bahkan lebih tinggi lagi yaitu sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang didasari oleh data yang tepat, akurat sesuai kenyataan, maka kebijakan yang dihasilkan juga sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan organisasi akan dengan mudah diwujudkan.

Terbentuknya dasawisma ini diharapkan dapat menggugah masyarakat agar termotivasi untuk selalu dinamis, serta dapat mengubah keadaan kepada yang lebih maju lagi. Seperti dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan peningkatan mutu dalam masyarakat. Dasawisma harus lebih mampu untuk berperan di masyarakat, baik sebagai motivator, komunikator, dinamisator yang mampu menyerap segala informasi dari masyarakat untuk kembali dipenuhi sebagai wujud kebijakan yang diambil pemangku kepentingan. Melalui kegiatan pendataan dihasilkan data yang sangat lengkap dan akurat. Data tersebut sebagai suatu informasi penting sebagai Decision Support System (DSS). Dengan adanya DSS ini diharapkan mampu menjadikan dasar dalam pengambilan kebijakan di Pemerintah Desa.

Sebagai saran kedepan, semoga hasil penelitian ini nantinya akan dijadikan studi tiru oleh desa yang lain sehingga didapat kondisi desa dimana perempuan perempuannya berdaya, tersedianya data desa yang sesuai dengan realita dan keakuratan yang bisa dipertanggung jawabkan, sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan sesuai kebutuhan masyarakatnya.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N. (1999). Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. (1992). Hasil Rakernas IX TP PKK Pusat Tahun 2021, Kemendagri.
- Onny S. Prijono; A. M. W. Pranarka (Center for Strategic and International Studies, 1996) RINGKASAN METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA
- Pemberdayaan Perempuan Oleh Lajnah Wanita Dan Putri Al-Irsyad Surabaya. Book. oleh ZAKIYAH Terbitan: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2010.